

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Komunikasi dalam Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Anak di Kota Bandung tentang Perlindungan Khusus oleh aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Tentang Perlindungan Khusus dilihat dari Penyampaian informasi, Kejelasan dan konsistensi. Penyampaian informasi aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung kepada masyarakat sudah tersalurkan melalui sosialisasi dan penyuluhan namun belum menyeluruh dan tidak sampai kepada sebagian masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui akan perlindungan anak, begitu juga dengan kejelasan informasi dan konsistensi komunikasi yang disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung cukup baik dilihat dari program – program yang berjalan setiap satu bulan sekali, namun perlu ditingkatkan kembali agar masyarakat dan anak-anak mengetahui dan paham terkait kebijakan perlindungan anak.
2. Sumberdaya dalam Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Anak di Kota Bandung tentang Perlindungan Khusus oleh aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak tentang Perlindungan Khusus dilihat dari dilihat dari

staff, fasilitas, dan informasi. Sumber daya staff Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung yang cukup dalam pelaksanaan perlindungan sudah baik, begitupun dari segi fasilitas sudah memadai, namun informasi perlu ditingkatkan kembali seperti website resminya.

3. Disposisi dalam Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Anak di Kota Bandung tentang Perlindungan Khusus aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung dalam pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Anak tentang Perlindungan Khusus dilihat dari sikap aparatur dan tingkat kepatuhan sudah baik, dilihat dari sikap para pelaksana dalam memberikan pelayanan kepada pelapor maupun orang yang memiliki kepentingan lain seperti peneliti.
4. Struktur Birokrasi dalam Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Anak di Kota Bandung tentang Perlindungan Khusus aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung dalam pelaksanaan perlindungan anak di Kota Bandung dilihat dari SOP dan Fragmentasi serta pembagian tanggung jawab oleh aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung sudah dapat memaksimalkan kewenangannya dalam menjalankan tugas.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas , maka peneliti mengajukan beberapa saran sebagai rekomendasi dalam perbaikan upaya khususnya perlindungan anak di Kota Bandung lain sebagai berikut:

1. Dalam penyampaian Informasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung harus lebih sering melakukan transmisi kepada masyarakat secara terus menerus, serta melakukan penjelasan dengan cara menyebar selebaran informasi di tempat strategis, tidak hanya di kantor dinas dinas terkait tetapi juga ke sekolah sekolah yang mayoritas berisi anak anak yang rentan, agar mengetahui terkait kebijakan perlindungan anak dan tidak ada kesimpang siuran informasi dan menyeluruh.
2. Informasi tidak hanya dalam bentuk fisik selebaran, namun dari segi media sosial seperti *website* resmi nya harus ditingkatkan dan lebih aktif agar masyarakat dari semua kalangan lebih mudah mengakses informasi.
3. Pihak-pihak yang berpengaruh harus dilibatkan dalam upaya perlindungan anak seperti tokoh masyarakat, tokoh agama atau orang yang dapat di dengar dan di ikuti oleh masyarakat.